



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami khaturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTB Tahun 2016 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2016 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550 – 559 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2021.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Mataram, 1 Februari 2017

Ketua PPID Provinsi NTB,

**Drs. LALU BAYU WINDYA, M.Si**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19610422 198603 1 004



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
Daftar Tabel .....	3
Bagian I : Gambaran Umum dan Kebijakan Layanan Informasi .....	4
Bagian II : Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi .....	6
Bagian III : Layanan Informasi Publik .....	9
Bagian IV : Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi .....	11
Bagian V : Kendala Eksternal dan Internal .....	12
Bagian VI : Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut .....	13
Bagian VII : Lampiran .....	14



# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1. Daftar Regulasi .....	5
Tabel 2.1.1. Sarana dan Prasarana PPID Provinsi NTB.....	6
Tabel 2.2.1. Sumber Daya Manusia PPID Provinsi NTB.....	7
Tabel 2.3.1. Daftar Informasi Publik yang telah didokumentasikan .....	7
Tabel 2.4.1. Jumlah Anggaran PPID Provinsi NTB T.A. 2016.....	8
Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan dan Download DIP .....	9
Tabel 3.2. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi .....	10
Tabel 4.1. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi .....	11

# **Bagian I**

## **GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Provinsi guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, atas dasar tersebut telah ditetapkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Adapun untuk kepengurusan PPID, pada awal tahun 2016 Gubernur Nusa Tenggara Barat menetapkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-559 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2020 sebagai pembaharuan atas Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 510-610 Tahun 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik dan telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB selaku atasan PPID Provinsi NTB Nomor : 188.44/8/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

## 1.1. REGULASI

**Tabel 1.1.1.** Daftar Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-559	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2020	2016
2.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 35	Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB	2012
3.	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor : 188.44/8/2013	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	2013
4.	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB Nomor 45	Penunjukan/Penugasan Staf Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2020	2016

## 1.2. ARAH PRIORITAS PELAYANAN

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID di tahun 2016, prioritas pelayanan yang menjadi fokus kerja dari PPID Provinsi NTB antara lain :

1. Mendokumentasikan DIP dari PPID SKPD.
2. Melaksanakan SOP penanganan keberatan informasi publik.
3. Melaksanakan SOP untuk pelaporan PPID.
4. Melakukan *upgrade* Sistem Informasi Publik (SIP-PPID) Provinsi NTB.
5. Menyusun daftar jenis informasi publik yang dikecualikan.
6. Pembinaan dan pelatihan SDM PPID di Seluruh SKPD dan Kabupaten/Kota.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten/Kota.

Hingga akhir tahun 2016, sebagian besar fokus kerja yang telah dirancang telah dicapai, seperti melakukan *upgrade* Sistem Informasi Publik PPID Provinsi NTB, melaksanakan Bimbingan Teknis PPID kepada operator PPID SKPD lingkup Pemprov NTB, mendokumentasikan DIP PPID SKPD, melaksanakan SOP PPID, pembinaan dan pelatihan SDM PPID di kabupaten/Kota serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.

## Bagian II

# GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

### 2.1. SARANA DAN PRASARANA

**Tabel 2.1.1.** Sarana dan Prasarana PPID Provinsi NTB

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETERSEDIAAN	DIPERLUKAN
1	Sarana Meja pelayanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meja Informasi (1 buah)</li> <li>- PC (1 buah)</li> <li>- Printer (1 buah)</li> <li>- Jaringan Internet (50 MBPS IndiHome)</li> <li>- Buku Tamu &amp; Catatan Permohonan</li> <li>- Telepon + fax (1 set)</li> <li>- Televisi (1 buah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desktop komputer (2 buah)</li> <li>- AC (1 buah)</li> <li>- Kursi tunggu (2 buah)</li> <li>- Catudaya / Genset (1 unit)</li> <li>- Stavolt (3 buah)</li> </ul>
2	Sarana Ruang kerja PPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PC (1 buah)</li> <li>- AC (2 buah)</li> <li>- Meja Rapat (6 buah)</li> <li>- Meja Kerja (2 buah)</li> <li>- Kursi rapat (20 buah)</li> <li>- LCD Proyektor (1 buah)</li> <li>- Printer (1 buah)</li> <li>- Lemari Arsip (2 buah)</li> <li>- UPS (2 buah)</li> <li>- Laptop (1 buah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop (3 buah)</li> <li>- Whiteboard rapat (1 buah)</li> <li>- Whiteboard agenda</li> <li>- Dispenser (1 buah)</li> <li>- Wireless audio (1 buah)</li> </ul>
3	Sarana Sosialisasi & Dokumentasi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Website SIP-PPID</li> <li>- Kamera DSLR (1 buah)</li> <li>- Banner (2 buah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobil Sosialisasi (1 buah)</li> <li>- Papan pengumuman (1 buah)</li> <li>- Majalah/Koran PPID</li> <li>- Mobile wireless audio (1 buah)</li> <li>- Harddisk External (2 buah)</li> </ul>

Pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Provinsi NTB cukup memadai untuk melaksanakan kegiatannya, namun memang terdapat kekurangan dalam beberapa aspek, sehingga perlu dilakukan penambahan beberapa peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran operasional PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

### 2.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Personil PPID Provinsi NTB sudah dikukuhkan dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 559-559 tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Masa Bhakti 2016-2020, memperbaharui keputusan sebelumnya yaitu Keputusan Gubernur NTB Nomor 550-610 Tahun 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

**Tabel 2.2.1. Sumber Daya Manusia PPID Provinsi NTB**

NO	KLASIFIKASI PERSONIL	TERSEDIA	DIPERLUKAN
1	Personil PPID Utama	- Pembina, Pengarah, Atasan, Ketua dan Sekretaris PPID (5 Orang) - Kepala Sekretariat, Koordinator Bidang dan Anggota (6 Orang) - Staf Sekretariat PPID (3 Orang)	- Tenaga IT / Fungsional Pranata Komputer (2 orang) - Fungsional Pranata Kehumasan (1 orang) - Fungsional Arsiparis (1 orang) - Cleaning Service (1 orang)

### 2.3. INFORMASI PUBLIK PADA SIP-PPID PROVINSI NTB

Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewajiban untuk mengumumkan informasi yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses *Website* PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat (<http://ppid.ntbprov.go.id>) secara *online*.

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada SIP-PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

NO	NAMA INSTANSI	JENIS INFORMASI PUBLIK			JUMLAH INFORMASI PUBLIK
		BERKALA	SERTA MERTA	SETIAP SAAT	
1	Inspektorat Provinsi NTB	8	-	4	12
2	Sekwan DPRD NTB	8	-	3	11
3	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi NTB	3	-	3	6
4	BAPPEDA Provinsi NTB	17	-	7	24
5	BPBD Provinsi NTB	8	-	2	10
6	BKPMPT Provinsi NTB	13	-	4	17
7	Bakesbang Poldagri	10	-	1	11
8	Badan Perpustakaan dan Arsip	20	-	2	22
9	BKD & Diklat	3	-	3	6
10	Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB	8	-	1	9
11	Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Prov. NTB	11	-	3	14
12	BAKORLUH Prov. NTB	5	-	1	6
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	3	-	5	8
14	Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)	4	-	-	4
15	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov.NTB	9	-	5	14

16	Dinas Kelautan & Perikanan Prov. NTB	11	-	3	14
17	Disnakertrans Provinsi NTB	14	-	3	17
18	Dinas Dikpora Provinsi NTB	11	-	8	19
19	Dinas Perindag Provinsi NTB	13	-	3	16
20	Dinas Pertambangan & Energi Provinsi NTB	10	-	11	21
21	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	9	-	6	15
22	Disosdukcapil Provinsi NTB	6	-	6	12
23	Dinas Perkebunan Provinsi NTB	6	-	-	6
24	Disbudpar Provinsi NTB	6	-	3	9
25	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB	9	-	2	11
26	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTB	2	-	3	5
27	Dinas Kehutanan Provinsi NTB	1	-	2	3
28	Dinas Pekerjaan Umum Prov. NTB	6	-	5	11
29	DISPENDA Provinsi NTB	11	-	6	17
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	12	-	8	20
31	Biro Hukum Setda Provinsi NTB	10	-	3	13
32	Biro Umum Setda Provinsi NTB	14	-	2	16
33	Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	16	-	1	17
34	Biro Administrasi Pembangunan & LPBJP Setda Provinsi NTB	6	-	3	9
35	Biro Adm. Kerjasama dan SDA Setda Provinsi NTB	8	-	8	16
36	Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi NTB	3	-	-	3
37	Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. NTB	8	-	1	9
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTB	10	-	3	13
39	Biro Kesra Setda Prov. NTB	5	-	2	7
40	KORPRI Provinsi NTB	7	-	2	9
41	SATPOLPP Provinsi NTB	1	-	2	3
42	Rumah Sakit Umum Prov. NTB	10	-	3	13
43	Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB	8	-	5	13
44	Kantor Penghubung Prov. NTB	4	-	1	5
45	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	5	-	2	7
<b>JUMLAH</b>		<b>380</b>	<b>-</b>	<b>153</b>	<b>533</b>

**Tabel 2.3.1.** Daftar Informasi Publik yang telah didokumentasikan

#### 2.4. BESARAN ANGGARAN :

**Tabel 2.4.1.** Jumlah Anggaran PPID Provinsi NTB T.A. 2016

NO.	SUMBER DANA PPID TAHUN 2016	BESAR ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN TERPAKAI (Rp.)
1.	APBD	564.652.700	560.614.359

Rincian dana terlampir pada Bab VII, Lampiran 7.2.



## Bagian III

# LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* (melalui SIP-PPID) dan *offline* (melalui desk layanan). Permohonan yang dilakukan melalui SIP-PPID dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet. Berikut data statistik pengunjung *Website* PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik melalui Sistem Informasi Publik (SIP) maupun Meja Layanan PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Tabel 3.1.** Rekapitulasi Jumlah Kunjungan dan Download DIP

Bulan	Jumlah Kunjungan (Pengunjung)	Jumlah Download DIP (Kali)
Januari	-	-
Februari	-	-
Maret	-	-
April	-	-
Mei	-	-
Juni	-	-
Juli	-	-
Agustus	896	360
September	739	614
Oktober	2.083	731
November	1.345	1.119
Desember	2.609	924
<b>Total</b>	<b>7.672</b>	<b>3.798</b>

**Tabel 3.2.** Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi

Bulan	Jumlah Permohonan	Media		Pemohon Informasi		Waktu		Pemberian Informasi			Alasan Penolakan
		Online	Meja Layanan	Individu	Lembaga	<10 hari	>10 hari	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak	
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
Maret	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
April	4	-	4	4	-	4	-	4	-	-	-
Mei	8	-	8	8	-	8	-	8	-	-	-
Juni	2	-	2	2	-	2	-	2	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	7	6	1	7	-	7	-	7	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	3	3	-	3	-	3	-	3	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	2	2	-	2	-	2	-	2	-	-	-
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Bagian IV

# PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang Tahun 2016, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Tabel 4.1.** Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudan		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Bagian V**

# **KENDALA INTERNAL EKSTERNAL**

### **5.1. KENDALA INTERNAL**

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Provinsi NTB sepanjang pelaksanaan tugas pada Tahun Anggaran 2016. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Pada awal bulan Januari 2016, masa aktif *hosting* dan *domain* Aplikasi SIP-PPID yang difasilitasi oleh AIPD (Bantuan Pemerintah Australia) melalui Kementerian Dalam Negeri telah berakhir, sedangkan PPID Provinsi NTB sebagai pengguna aplikasi tersebut tidak memperoleh *backup* data yang pernah di-*upload* pada aplikasi tersebut.
2. Permohonan untuk fasilitasi *user* aplikasi lanjutan SIP-PPID di Kementerian Dalam Negeri belum dapat dilakukan dikarenakan belum rampungnya proses pembuatan aplikasi PPID lanjutan oleh Kemendagri, sehingga *website* dan aplikasi SIP-PPID Provinsi NTB pada awal hingga pertengahan tahun 2016 mengalami *suspend*.
3. Pada Bulan Juni 2016, PPID Provinsi NTB membuat rancangan dan pembuatan *website* dan Sistem Informasi Publik PPID secara mandiri. Pembuatan tersebut dimulai pertengahan Juni 2016 dan rampung pada pertengahan Juli 2016 dan resmi dioperasikan untuk pelayanan informasi publik pada 1 Agustus 2016.
4. Selama *Website* dan Aplikasi SIP-PPID *suspend*, pelayanan informasi publik hanya dilakukan melalui meja layanan dan *e-mail*.

### **5.2. KENDALA EKSTERNAL**

Kendala Eksternal yang dihadapi pada tahun 2016 adalah adanya masyarakat yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat, dimana saat mengunjungi desk layanan, masyarakat yang hendak memohon informasi setiap saat tidak membawa kartu identitasnya.

## **Bagian VI**

# **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi tersebut dengan melakukan tatap muka langsung yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, sarasehan, *workshop* maupun bimbingan teknis. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Provinsi NTB dapat lebih maksimal kedepannya.

## Bagian VII LAMPIRAN

### LAMPIRAN 7.1. Daftar Permohonan Informasi

No.	Tanggal	Nama	Alamat / Email	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan	Status
1	29/2/16	Dra. Tjitra Indyasasih	Jl. Segara Anak 58 Seruni Ampenan	Penerimaan Akademi Pelayaran	Seleksi Catar	Dipenuhi
2	3/3/16	Fauzan Ahmadi	Pelita Dasan Agung	Info Sipencatar 2016	Seleksi Catar	Dipenuhi
3	27/4/16	Novalda	Jl. Majapahit No. 8 Mataram	Keuangan PPID	Komparasi	Dipenuhi
4	27/4/16	Fauzi Budiman	Jl. Transmigrasi Mataram	Informasi Renbangda	Studi	Dipenuhi
5	28/4/16	Gerry Tan	Jl. Panca Usaha Cakranegara	Info Investasi Tanah	Investasi	Dipenuhi
6	29/4/16	Ong Tji Fie	Ampenan Barat	Info Investasi Mutiara	Investasi	Dipenuhi
7	2/5/16	Heru Ismono	Gegutu Rembiga	Informasi Kerjasama Penelitian	Kerjasama	Dipenuhi
8	4/5/16	Soni Heriawan	Majeluk Mataram	Standar UMR NTB Tahun 2016	Pribadi	Dipenuhi
9	9/5/16	M. Apriadi Rahmanto	Peresak Timur Pagutan	Informasi CPNS 2016	Seleksi CPNS	Dipenuhi
10	10/5/16	Benny Kurniawan	Ampenan Timur	Informasi Sipencatar 2016	Seleksi Catar	Dipenuhi
11	12/5/16	Firmansyah Putra	Jl. Brawijaya Mataram	Informasi RKPD	Studi	Dipenuhi
12	12/5/16	Effendi Sholeh	Jl. TGH Faisal No. 56	Informasi Harga Komoditas Pangan	Pengembangan Usaha	Dipenuhi
13	16/5/16	Galuh W.F.	Jatisela Lombok Barat	Informasi UMR Standar 2016	Pribadi	Dipenuhi
14	17/5/16	Darsono	Ampenan Tengah	Data Warnet Kota Mataram	Studi	Dipenuhi
15	1/6/16	M. Fariz	Labuapi Lobar	Data Daerah Rawan Bencana	Studi	Dipenuhi
16	6/6/16	Agus Winarto	Taman Baru Mataram	Info Lokasi Paket Perbaikan Jalan	Studi	Dipenuhi
17	5/8/16	Andi Wicaksono	TB Simatupang Jakarta	Pola Pengajuan Kerjasama	Kerjasama	Dipenuhi
18	27/8/16	Adit	mr.curiosity0201@gmail.com	SOP Dikes	Studi	Dipenuhi
19	28/8/16	Nurul	nurul.sasak@gmail.com	Renstra BKPM-PTSP	Studi	Dipenuhi
20	30/8/16	Budi Ayu	Lombok Barat	Renja Disosdukcapil 2016	Info Bantuan Sosial	Dipenuhi
21	30/8/16	Saufani Rosyida	Lombok Barat	Renstra Dikpora	Bahan Penelitian	Dipenuhi
22	30/8/16	Nouval	Lombok Barat	Renstra Bappeda	Pengembangan Usaha	Dipenuhi
23	30/8/16	Nouval	Lombok Barat	Renstra BKPM-PTSP 2014-2018	Pengembangan Usaha	Dipenuhi
24	13/10/16	Achmad Zaki Ambadar	achmad.ambadar@giz.de	Renstra Dishubkominfo 2013-2018	Penyusunan RAD GRK	Dipenuhi
25	20/10/16	Ridho Alam	ridho.alam26@gmail.com	Data Keluarga Berencana NTB	Bahan Penelitian	Dipenuhi

26	23/10/16	Teguh S.	teguh.s@gmail.com	Renstra RSJ Mutiara Sukma 2013-2018	Studi	Dipenuhi
27	13/12/16	Suyono	yono.asmuni@gmail.com	APBD 2016 SKPD NTB : Dishubkominfo, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Informasi anggaran bidang pangan dan gizi	Dipenuhi
28	14/12/16	Baiq Puput Jenianti	Dasan Agung Mataram	Informasi tentang Retribusi Pelayanan Telekomunikasi	Bahan Penelitian	Dipenuhi